ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2017
(Studi Kasus Pada 118 Kabupaten/Kota)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Febrinia Rahma Atu Fitria
145020101111023

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2017

(Studi Kasus Pada 118 Kabupaten/Kota)

Yang disusun oleh :

Nama	:	Febrinia Rahma Atu Fitria
NIM	:	145020101111023
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 November 2018.

Malang, 20 November 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., MS.i.

NIP. 19631116 199002 1 001

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2017
(Studi Kasus Pada 118 Kabupaten/Kota)

Febrinia Rahma Atu Fitria*, Rachmad Kresna Sakti**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
*Email: febriniaaq14@gmail.com **Email: kresnayangsakti@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban, sehingga semua pihak sepakat bahwa upaya menekan sampai dengan menuntaskan kemiskinan harus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017, dengan studi kasus pada 118 Kabupaten/Kota. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (Simreg) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Teknik analisis yang dipergunakan adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya mampu menyentuh sedikit pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Metode Analisis Regresi Data Panel.

A. PENDAHULUAN

Tidak satu pun negara diproklamasikan tanpa cita-cita abadi luhur, karena di setiap cita-cita itulah terletak kepentingan bersama yang diikat secara kuat untuk menggapai tujuan (Yustika, 2003). Begitu pun Indonesia, didirikan dengan menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan (ekonomi). Seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih haruslah menuju kepada kemaslahan bersama, tidak diijinkan ada satu manusia yang lebih sejahtera secara mencolok dibandingkan dengan individu lainnya.

Isu mengenai kemiskinan (*poverty*) merupakan fokus pembangunan di setiap negara di Dunia. Sekalipun telah menjadi komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan disadari bukan merupakan hal yang sederhana, mengingat sifatnya yang kompleks. Baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Kompleksnya masalah kemiskinan membuatnya terus menjadi agenda rutin setiap tahapan pembangunan di berbagai negara. Setiap negara selalu berharap bisa terbebas dari masalah kemiskinan. Meski terdengar mustahil, namun harapan tersebut harus bisa diwujudkan oleh siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, bahwa seluruh masyarakat harus sejahtera.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi sarang kemiskinan. Kemiskinan adalah simbol sosial yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Predikat "Negara Miskin" seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal begitu melimpah. Kemiskinan merupakan musuh utama bagi Negara Indonesia, yang sedang membangun untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Di mana berbagai wilayah berada dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle*) terkungkung atau terbelilit dalam lingkaran kemiskinan atau lingkaran setan, seperti sangat sulit untuk melepaskan atau keluar dari zona tersebut.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial di tahun 2017, masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,09 persen. Kemudian diikuti Pulau Sumatra sebesar 21,52 persen, Pulau Kalimantan 8,50 persen, Pulau Sulawesi 6,09 persen, dan sisanya 5,64 persen pulau-pulau lainnya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara spasial pada tahun 2017 menurut provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar terhadap PDB dengan total kontribusi 54,02 persen. Keempat provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu artinya, Pulau Jawa menjadi pusat dari pada pertumbuhan ekonomi nasional, dibandingkan dengan wilayah lainnya. Namun, setelah pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan dengan cukup memuaskan, masalah yang timbul disekitar wilayah pembangunan ekonomi justru bertambah rumit.

Menurut Adisasmita (2015) klasifikasi wilayah dapat ditetapkan menggunakan kriteria tingkat pendapatan per kapita (yang mencerminkan tingkat kemakmuran), sehingga dapat dibedakan menjadi wilayah makmur (maju) dan wilayah kurang makmur (kurang maju). Klasifikasi wilayah dapat dilakukan pula menggunakan kemampuan berkembangnya wilayah (dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB per tahun), maka dapat dikelompokkan sebagai wilayah cepat bertumbuh (cepat berkembang) atau lamban bertumbuh (lamban berkembang). Lebih lanjut Adisasmita (2015) menjelaskan, wilayah yang cepat bertumbuh/berkembang (*fast growing region*) atau wilayah yang maju (*developed region*) tidak menghadapi masalah yang berarti. Sebaliknya yang menghadapi berbagai kendala dan hambatan adalah wilayah yang lamban bertumbuh (*slow growing region*) atau wilayah yang kurang maju (*less developed*). Namun, fenomena sebaliknya justru yang terjadi di Pulau Jawa. Di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan dengan cukup memuaskan, masalah yang timbul di Pulau Jawa justru bertambah dan semakin sulit untuk diidentifikasi. Kemiskinan merupakan bagian dari persoalan-persoalan tersebut. Dapat diketahui pada Gambar 1 di bawah ini, jumlah penduduk miskin Indonesia secara spasial di tahun 2017, didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa.

Gambar 1: **Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2017 (Juta Jiwa)**

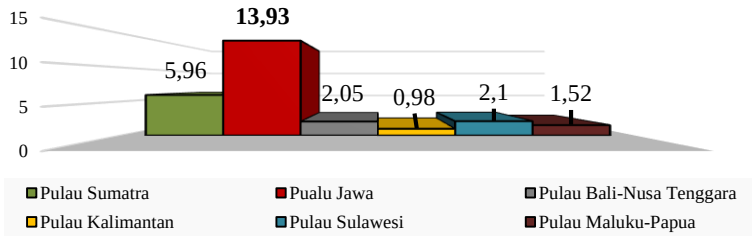

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Berdasarkan gambar di atas, diketahui di tahun 2017 jumlah penduduk miskin tertinggi ditempati oleh Pulau Jawa, sebesar 13,93 juta jiwa. Kemudian di posisi kedua yakni Pulau Sumatra, diikuti Pulau Sulawesi, Pulau Bali-Nusa Tenggara, Pulau Maluku-Papua, dan di posisi terakhir ditempati oleh Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,98 juta jiwa. Lebih lanjut Gambar 2, jika dilihat perkembangan kemiskinan Pulau Jawa periode tahun 2011-2017, jumlah penduduk miskin Pulau Jawa terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015.

Gambar 2: **Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (Juta Jiwa)**

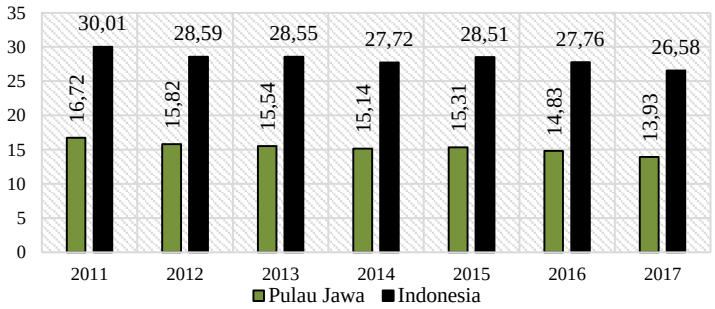

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Berdasarkan gambar di atas sekaligus dapat diketahui, bahwa lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa. Sekitar 52 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa dari total penduduk miskin Indonesia 2017. Lebih lanjut lagi, jika dilihat dari tingkat persentase penduduk miskin menurut provinsi (Tabel 1), tingkat kemiskinan tertinggi ditempati oleh Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 12,36 persen, kemudian Provinsi Jawa Tengah, diikuti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan terakhir Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 3,78

persen, di tahun 2017. Sedangkan perkembanganya sendiri, rata-rata persentase kemiskinan pada masing-masing provinsi periode tahun 2011-2017 mengalami penurunan, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Di mana kedua provinsi tersebut cenderung berfluktuatif.

Tabel 1: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Target
DKI Jakarta	3.64	3.70	3.72	4.09	3.61	3.75	3.78	3.00
Jawa Barat	10.57	9.89	9.61	9.18	9.57	8.77	7.83	7.60
Jawa Tengah	16.21	14.98	14.44	13.58	13.32	13.19	12.23	11.30
D.I Yogyakarta	16.14	15.88	15.03	14.55	13.16	13.10	12.36	11.80
Jawa Timur	13.85	13.08	12.73	12.28	12.28	11.85	11.20	10.40
Banten	6.26	5.71	5.89	5.51	5.75	5.36	5.59	4.50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Penurunan angka kemiskinan provinsi di Pulau Jawa disadari mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. BPS menilai, kemiskinan di Indonesia sudah pada tahap kronis, pemerintah sangat kesulitan hanya mengurangi 1% tingkat kemiskinan saja. Lebih dari itu, meski rata-rata angka kemiskinan menurun di setiap provinsi, angka tersebut masih belum mencapai target yang tercantum atau ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan Tabel 1, juga dapat diketahui target/sasaran capaian tingkat kemiskinan pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Kemudian masih adanya provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas persentase nasional (Gambar 3) pada tahun 2017. Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi di provinsi yang ada di Pulau Jawa, diantaranya Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Sesuai Rencana Pembangunan Wilayah Jawa 2018, lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan wilayah Jawa yakni, ketiga provinsi yang telah disebutkan sebelumnya, dan ditambah Provinsi Jawa Barat (Kementrian PPN/Bappenas, 2018). Selain itu, data Kabupaten/Kota yang ada juga menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017, ternyata tidak jauh berbeda atau relatif sama. Ini memperlihatkan tidak banyaknya perubahan kondisi kesejahteraan di daerah Pulau Jawa.

Gambar 3: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2017**

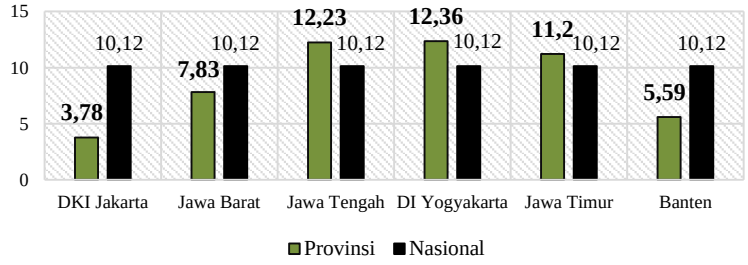

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Oleh karena beberapa hal tersebut, di mana masih perlunya upaya yang lebih kuat lagi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai nilai dari pembangunan manusia merupakan suatu hal penting dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian tingkat pengangguran, juga salah satu faktor penting untuk pengentasan kemiskinan. Di mana besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan seseorang dan atau keluarga untuk menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan pokok (Sukirno, 2006). Beberapa penelitian terkait masalah kemiskinan telah banyak dilakukan di Indonesia dengan menguji berbagai variabel yang mempengaruhi kemiskinan baik di tingkat Nasional maupun Daerah Kabupaten/Kota, dengan periode waktu yang berbeda-beda, dan dengan respon yang berbeda-beda pula, meski dengan beberapa variabel solusi yang rata-rata sama.

Berdasarkan pemaparan atas data, teori, fenomena ekonomi serta hasil penelitian terdahulu di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Apakah terjadi fenomena yang sama jika di Pulau Jawa, terkait kajian tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sebagai percontohan bagi daerah lain di luar Pulau Jawa khususnya, yang akan menuju pembangunan

ekonomi yang lebih sejahtera. Supaya nantinya ketika telah mencapai pembangunan yang diharapkan tidak mengulang permasalahan yang terjadi di Pulau Jawa. Mengingat banyaknya faktor penyebab kemiskinan yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan terbatasnya ketersediaan data yang memuat informasi tentang kemiskinan dan faktor-faktor penentunya maka penelitian ini akan dibatasi pada faktor-faktor yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran, dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa dalam periode tahun 2011-2017.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan

Wignjosoebroto *et al*., dalam Suyanto (2013) menyatakan bahwa seseorang atau keluarga yang dijejas kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada taraf yang subsisten bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya. Sedangkan Robert Chambers meyatakan, inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau "perangkap kemiskinan".

Lebih lanjut Nurkse, Meier, dan Baldwin dalam Sukirno (2006), menggambarkan (Gambar 4) tiga bentuk perangkap kemiskinan. Berdasarkan gambar tersebut, jika disimpulkan lingkaran perangkap kemiskinan, pada hakikatnya bahwa, adanya ketidakmampuan mengerahkan tabungan yang cukup, kurangnya rangsangan melakukan penanaman modal, dan rendahnya taraf pendidikan, pengetahuan, serta kemahiran masyarakat.

Gambar 4: **Lingkaran Perangkap Kemiskinan**

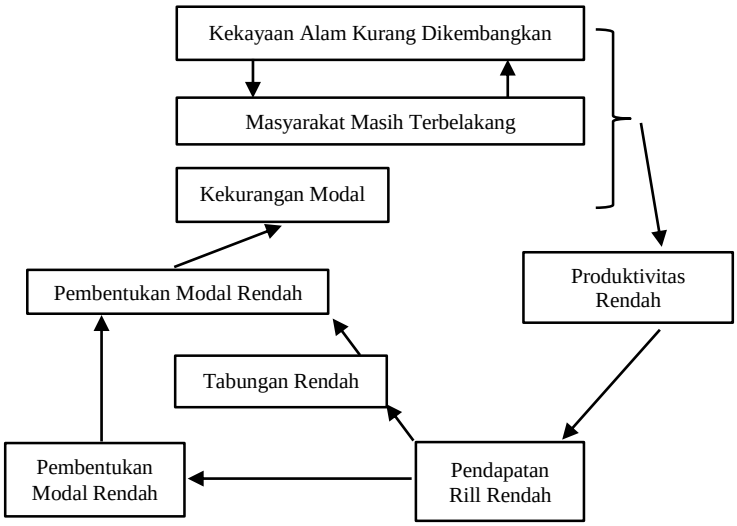

Sumber: Sukirno (2006).

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan dengan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi sebagai akibat dari berkembangnya kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat (Sukirno, 2006). Disebut sebagai pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan dari berbagai macam sektor ekonomi dan indikator penting bagi suatu negara atau daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Adanya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan aktivitas perekonomian sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian pada dasarnya adalah proses untuk

menghasilkan output dan selanjutnya akan memberikan balas jasa berupa pendapatan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut.

Sukirno (2006), mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan nasional atau daerah sendiri adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu, secara konseptual nilai tersebut dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Sesuai dengan paradigma pembangunan yang menekankan pada pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manuisa (*human centered development*). Menurut Cobb-Douglas, modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan suatu bangsa. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset penting bagi pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di mana teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam peningkatan pembangunan modal manusia. Sehingga tercipta konsep pengukuran dari pada Pembangunan Manusia yang disebut HDI atau IPM.

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM dikembangkan oleh Amrtya Sen (Pemenang Nobel asal India) dan Mahbub ul Haq (Ekonom asal Pakistan), yang dibantu oleh Gustav Ranis (Yele University) dan Lord Meghnad Desal (London School of Economics). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan: usia hidup *(longevity)*; (ii) bidang pendidikan: pengetahuan *(knowledge)*; dan (iii) bidang ekonomi: standar hidup layak *(decent living)*.

Dengan demikian, IPM merupakan Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur menggunakan 3 dimensi (Tabel 2), yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Tabel 2: **Metode Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Metode Lama (Sebelum 2010)		**Metode Baru (Pasca 2010)**	
Dimensi	**Indikator**	**Dimensi**	**Indokator**
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup (AHH)
Pendidikan dan Pengetahuan	Angka Melek Huruf dan Rasio Kombinasi Partisipasi Kotor Primer, Sekunder, dan Tersier	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Sekolah
Standar Hidup Layak	Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita	Standar Hidup Layak	Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah).

Konsep Pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka sering digunakan oleh pemerintah dalam menilai apakah kinerja di bidang ketenagakerjaan berjalan baik atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep dari pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai sumber data atas tingkat pengangguran. TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, di mana rumus dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adalah:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{Jumlah\ Penganggur}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja}\ x\ 100\%$$

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian Pulau Jawa, pada periode penelitian tahun 2011-2017. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi dan basis data pada situs resmi dari berbagai institusi, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) baik di tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (Simreg) Bappenas baik di tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak statistik yakni Eviews *Student Version* 10. Regresi data panel dipilih karena data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel, yaitu perpaduan data dari *time-series* dan *cross-section*. Berdasarkan metode analisis regresi data panel, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$TK_{it} = \alpha_{it} + \beta 1\ PE_{it} + \beta 2\ IPM_{it} + \beta 3\ TPT_{it} + e_{it}$$

Keterangan:
TK = Tingkat Kemiskinan
PE = Pertumbuhan Ekonomi
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
α, $\beta 1$, $\beta 2$, $\beta 3$ = Koefisien Regresi
e = *Erorr*
i = *Cross-Section*
t = *Time-Series*

D. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Pemilihan Model

Pemilihan model diperlukan (tahap awal pada Analisis Regresi Data Panel) untuk menentukan model terbaik sekaligus yang paling tepat, yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan model sendiri dilakukan dengan 3 kali pengujian diantaranya, *Chow Test, Hausman Test,* dan *Lagrange Multiplier Test*.

Gambar 5: **Hasil *Chow Test***

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FE
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	432.202203	(117,705)	0.0000

Catatan: *) Prob. Cross-section F > alpha 5% (α = 0.05): Random Effect Model
**) Prob. Cross-section F < alpha 5% (α = 0.05): Fixed Effect Model

Gambar 6: **Hasil *Hausman Test***

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RE
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	59.429102	3	0.0000

Catatan: *) Prob. Cross-section random > alpha 5% (α = 0.05): Random Effect Model
**) Prob. Cross-section random < alpha 5% (α = 0.05): Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil uji *chow* dan uji *hausman* di atas, mendapatkan kesimpulan bahwa model terpilih dan terbaik adalah model *fixed effect*. Karena dari kedua uji pemilihan model memberikan hasil yang sama yakni *fixed effect model*, maka Uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak perlu dilakukan.

Berikut Tabel 3, hasil estimasi *fixed effect model* regresi data panel:

Tabel 3: **Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) Metode Panel EGLS (*Cross-section weights*)**

Variable	***Coefficient***	***Std. Error***	***t-Statistic***	***Prob.***	**Katerangan**
PE	-0,021854	0,014066	-1,553734	0,1207	Tidak Signifikan
IPM	-0,483269	0,011326	-42,66721	0,0000	Signifikan
TPT	0,035335	0,011312	3,123535	0,0019	Signifikan
Constanta	45,07218	0,841518	53,56056	0,0000	
R-squared: 0,992370					
Prob. F-statistic: 0,000000					

Catatan: *) Sign. 5%.

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews *Student Version* 10, 2018.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi direspon oleh tingkat kemiskinan, namun tidak signifikan. Adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih tidak sepenuhnya mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Dengan kata lain adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, hanya sedikit atau tidak banyak mempengaruhi terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan. Sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. BPS mencatat secara lengkap kinerja ekonomi 2017, secara sektoral donasi terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata 27,45 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,13 persen, konstruksi 10,19 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 8,58 persen, transportasi dan pergudangan 5,42 persen, dan terendah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 0,08 persen. Bahwa sektor *tradeable* yakni sektor industri dan sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi bagian penyokong terbesar ekonomi Pulau Jawa.

Dari sisi pertumbuhan sektoral, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi 9,54 persen, diikuti sektor jasa perusahaan 7,44 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 7,20 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,20 persen, konstruksi 6,93 persen, dan transportasi dan pergudangan 6,66 persen. Sementara itu sektor industri pengolahan tumbuh 5,37 persen, hal yang sama juga terjadi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pertumbuhannya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yakni hanya 1,86 persen. Dengan begitu, pola pertumbuhan sektoral didominasi oleh *non-tradeable sector*.

Meskipun pertumbuhan ekonomi ini relatif tinggi, namun banyak pihak yang belum dapat menikmati tingginya pertumbuhan ekonomi ini. Problema pertumbuhan bisa dilihat dari struktur sumbangan sektoral. Sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, donasinya terhadap PDRB terus merosot sejak 3 tahun terakhir. Namun, khusus sektor pertanian ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah kontribusinya terhadap PDRB jika menurun, asalkan diikuti dengan penurunan beban tenaga kerja atau tenaga kerja di sektor tersebut. Masalahnya, penurunan kontribusi terhadap PDRB tidak selaras dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Maka penurunan donasi sektor industri pengolahan dan pertanian terhadap PDRB merupakan kondisi yang mengkhawatirkan terutama dalam jangka panjang, karena kedua sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Ketimpangan di Pulau Jawa bisa dilihat dari dari tiga sisi, yaitu ketimpangan sektoral, daerah, dan individu. Ketimpangan sektoral, di mana sektor *non-tradeable* menikmati pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya sektor *tradeable* yakni sektor industri, pertanian, dan pertambangan pertumbuhannya relatif rendah. Hal ini yang kemudian memicu ketimpangan pendapatan antar penduduk. Sektor *non-tradeable* tumbuh tinggi tapi hanya menampung sedikit tenaga kerja, sehingga mereka yang terlibat didalamnya menikmati pendapatan yang tinggi. Hal yang berbeda terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian yang tumbuh rendah, namun penyerapan tenaga

kerjanya sebaliknya tinggi. Konsekuensinya mereka yang terlibat dikedua sektor tersebut hanya menerima pendapatan yang rendah.

Hal tersebut dapat dijelaskan oleh data ketimpangan yakni Rasio Gini, rata-rata masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2017 mengalami kenaikan dan termasuk dalam kategori sedang yakni bekisar 0,3-04. Jadi, dengan tambahan data ini sebetulnya kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dari tahun ke tahun tidak banyak berarti karena penikmat kenaikan itu hanya sebagian kecil masyarakat. Sementara itu ketimpangan antar daerah di Pulau Jawa sendiri juga masih tinggi, di mana DKI Jakarta menyumbang 29,81 persen, Jawa Barat 22,09 persen, Jawa Tengah 14,68 persen, D.I Yogyakarta 1,47 persen, Jawa Timur 24,97 persen, Banten 6,98 persen.

Singkatnya, yang menjadi masalah adalah melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami mengapa meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, sedangkan kemiskinan dalam masyarakat semakin bertambah. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah semakin lebar, akan dapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pada pembangunan itu sendiri. Artinya, setiap kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, pada saat yang sama bisa jadi sedang berlangsung proses pemiskinan. Sejalan dengan ini, Arsyad (2010) menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*trickle down effects*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas. Dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Kemudian hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tersebut ditemukan dibeberapa negara. Kajian yang mendukung teori namun tidak sejalan dengan temuan penelitian ini dilakukan pada 45 Negara di Asia Timur dan Selatan, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika Sub-Sahara. Hasan dan Quibria, dalam Tambunan (2015) yang menguji secara empiris dampak dari pola pertumbuhan output terhadap penurunan kemiskinan, ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, negara-negara dengan tingkat Pendapatan Nasional per kapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tingkat Pendapatan Nasional per kapitanya lebih rendah.

Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Alberto Javier Iniguez-Montiel (2014) di Mexico pada periode tahun 1992-2008, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang begitu sebaliknya. Artinya adanya hubungan atau pola yang negatif antara pertumbuahn ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga tampak pada penelitian dalam negeri yang dilakukan oleh Alhudori (2017), bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi periode tahun 2010-2015. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan penjelasan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*).

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) direspon penuh oleh tingkat kemiskinan, dengan pola yang negatif. Artinya adanya peningkatan IPM mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, begitu pun sebaliknya. Fakta hasil pengujian statistik ini didukung oleh fakta empirik dari perbandingan kedua variabel, IPM dan tingkat kemiskinan (TK). Hasil pengujian statistik yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan tersebut tampak pada perbandingan kedua variabel, yang menunjukkan bahwa adanya pola yang tidak searah atau berlawanan antara IPM dan tingkat kemiskinan. Secara umum IPM yang tinggi mempunyai kecenderungan dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Sejalan dengan pernyataan Arsyad (2010), bahwa salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kondisi kemiskinan akan membaik. Selain itu Ginting, *et. al* (2008), menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau, sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Kajian yang mendukung teori dan yang sejalan dengan temuan penelitian ini dilakukan di tingkat Nasional pada 33 Provinsi di Indonesia periode tahun 2011-2015, oleh Zuhdiyaty dan Kaluge (2017), bahwa ada suatu korelasi negatif signifikan antara IPM dan kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) direspon penuh oleh tingkat kemiskinan dengan pola yang positif. Artinya adanya penurunan TPT dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, begitu sebaliknya. Fakta hasil pengujian statistik ini didukung oleh fakta empirik dari TPT dan tingkat kemiskinan (TK). Hasil pengujian statistik yang menunjukkan pengaruh positif signifikan tersebut tampak pada perbandingan kedua variabel, yang menunjukkan bahwa adanya pola yang searah antara TPT dan tingkat kemiskinan. Secara umum TPT yang rendah mempunyai kecenderungan yang diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Mendukung pernyataan Sukirno (2006) bahwa, besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan keluarga untuk menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan pokok. Salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakatnya, di mana pendapatan akan diperoleh seseorang ketika bekerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai alat ukur kemakmuran suatu negara, yang memiliki korelasi positif. Artinya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara, begitu sebaliknya.

Lebih dari itu, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Dengan pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa orang yang menganggur pasti lebih mudah menjadi miskin dari pada orang yang tidak menganggur. Kajian yang mendukung teori dan yang sejalan dengan temuan penelitian ini dilakukan oleh Alhudori (2017), bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada periode tahun 2010-2015.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan bahwa, kurangnya kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi, karena masih tidak sepenuhnya mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pola pertumbuhan sektoral yang didominasi oleh *non-tradeable sector*. Di mana akhirnya memicu ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar penduduk dalam masyarakat.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dari IPM direspon penuh dengan penurunan tingkat kemiskinan yang ada. Secara lebih luas, peningkatan kualitas dari dimensi IPM yakni Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi memberikan manfaat pada penurunan tingkat kemiskinan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan dari TPT direspon penuh dengan penurunan tingkat kemiskinan yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan paparan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota lebih mengarah pada fungsi distribusi yang memihak kepada masyarakat miskin. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada kelompok penduduk miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan. Dengan kata lain, pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih mengupayakan untuk pertumbuhan pada *tradeable sector*. Lebih dari itu untuk setiap daerah di Pulau Jawa, penting untuk meningkatkan pertumbuhan sektor yang menjadi potensi lokal, akan tetapi dengan mempertimbangkan manfaat yang diberikan kepada seluruh pihak terutama pada kelompok masyarakat miskin. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan ke depan bukan lagi pertumbuhan ekonomi yang eksklusif melainkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga harapan kedepannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan kontribusi penuh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya, terutama teruntuk masyarakat miskin pedesaan. Pasalnya investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM) akan memperbaiki standar hidup baik di desa maupun perkotaan. Meningkatnya produktivitas manusia, pada akhirnya dapat membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan yakni kemiskinan. Selain itu, mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia itu sendiri.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya, diharapkan melakukan peningkatan kesempatan kerja guna mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan upah dari kelompok penduduk miskin. Dengan kata lain, salah satu cara atau mekanisme utama dalam mengurangi kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja berupah yang memadai bagi kelompok penduduk miskin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Allah SWT serta semua pihak yang telah membantu baik orang tua, saudara, dan teman-teman sehingga pembuatan jurnal ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alhudori, M. 2017. *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*. Ekonomis: Jurnal of Economics and Business Vol. 1 No. 1. (https://media.neliti.com/media/publications). Diakses pada 07 Mei 2018.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Indonesia dalam Infografis 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase Penduduk Miskin, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah Penduduk Miskin, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Gini Ratio, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017*. Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2017 (Persen).* Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2017 (Persen)*. Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2017 (Metode Baru)*. Diakses pada 01 September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.

Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2018. *Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kota*. Bandung: Bappeda Jabar.

Bappeda, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2018. *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Bappeda Jatim.

Kementrian PPN/Bappenas. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas.

Ginting, Charisma K. S., Irsad Lubis, & Kasyful Mahalli. 2008. *Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Vol. 04 No. 1, Wahana Hijau. (http://repository.usu.ac.id). Diakses pada 3 Mei 2018.

Hasibuan, Sayuti. 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Hendrani, Pilar. 2012. *Konvergensi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten*. Bogor: Tesis, Institut Pertanian Bogor. (https://repository.ipb.ac.id). Diakses pada 27 Mei 2018.

Jhingan, M. L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Montiel, Alberto Javier Iniguez. 2014. *Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992-2008)*. World Development Vol. 59, pp. 313-326. (www.elsevier.com/locate/worlddev). Diakses pada 03 Mei 2018.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-TRANS Publishing.

Tambunan, Tulus T.H. 2015. *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Vries, Egbert de. 1985. *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Pengantar: Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia.

Yacoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal EKSOS ISSN 1693-9093 Vol. 8. (http://riset.polnep.ac.id). Diakses pada 09 Mei 2018.

Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yustika, Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan & Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.

Zuhdiyaty, Noor & David Kaluge. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir: Studi Kasus pada 33 Provinsi*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Stie Asia Vol. 11 No. 2. (http://lp3m.asia.ac.id). Diakses pada 01 April 2018.